



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2025; dan
- b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Renja sekretariat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Renja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Renja inspektorat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Renja badan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Renja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Renja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Renja badan penanggulangan bencana daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Renja badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Renja badan riset dan inovasi daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Renja dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Renja dinas kesehatan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- l. Renja dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Renja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Renja dinas kearsipan dan perpustakaan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Renja dinas kebudayaan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Renja dinas ketahanan pangan dan perikanan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Renja dinas komunikasi dan informatika Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Renja dinas perhubungan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Renja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Renja dinas lingkungan hidup dan pertanahan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Renja dinas pariwisata Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Renja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Renja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Renja dinas ketenagakerjaan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Renja dinas pertanian Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Renja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Renja kecamatan nusa penida Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Renja kecamatan dawan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Renja kecamatan banjarangkan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ee. Renja kecamatan klungkung Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

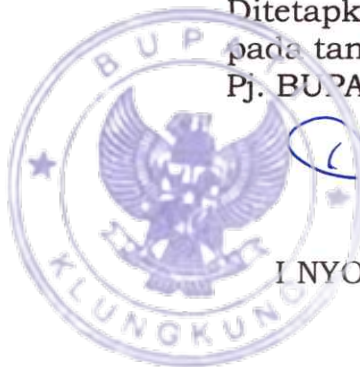
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Brida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan (litbang), juga berkewajiban menyusun Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra Brida dan RKPD. Penyusunan renja Badan Riset dan Inovasi Daerah mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Persiapan penyusunan meliputi pembentukan dan orientasi terhadap tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dan dilaksanakan pada Desember 2023. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2024). Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap penyusunan rancangan merupakan tahapan penyempurnaan rancangan Renja berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 102/2024/Bappeda tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan akhir renja menjadi rancangan dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan renja Badan Riset dan Inovasi Daerah disampaikan kepada Bappeda selambatnya pada Minggu pertama bulan Maret 2024 untuk diverifikasi.

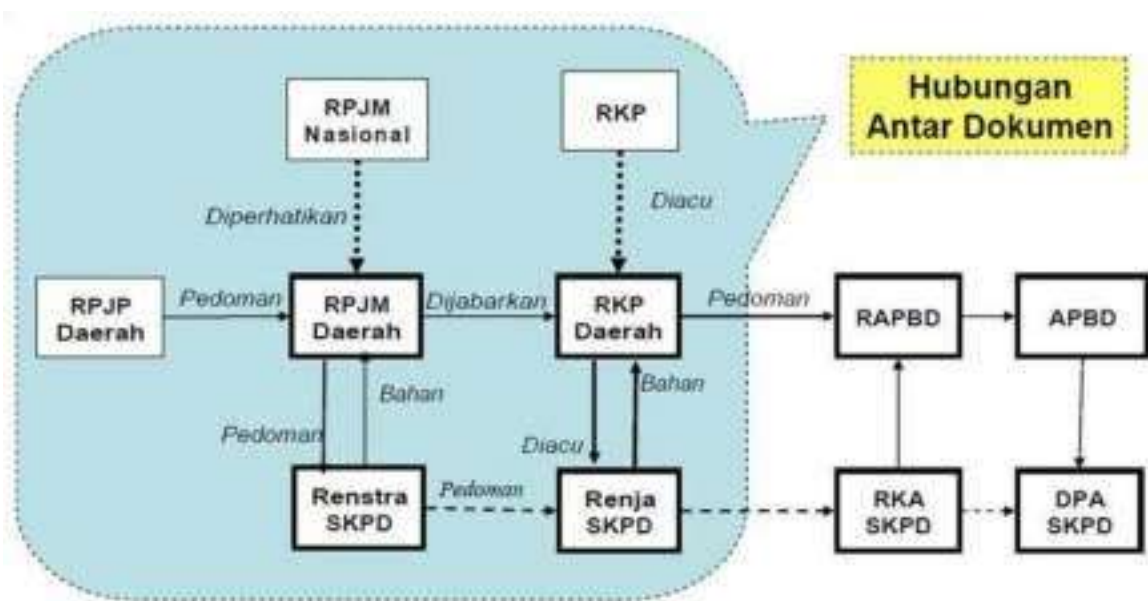
Forum Perangkat Daerah yang membahas rancangan renja Badan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Brista. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan

rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Brista untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Brista menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah ditetapkan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hubungan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan berkewajiban juga menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah di bidang penelitian dan pengembangan selama tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan RKA Badan Riset dan Inovasi

- Daerah Tahun 2025; dan
- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Ranwal Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Bida Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan

sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar Rp. 2.512.477.008,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 2.088.728.491,- dengan Prosentase 83,13%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakann, Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 hampir semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Indikator Kinerjanya tercapai. Semua Target Indikator Kinerja Baik Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagian besar dapat tercapai meskipun terdapat juga penyerapan anggarannya belum maksimal.

Adapun program/kegiatan penyelenggaraan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 dan alokasi serta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.425.648.658,00 dan terealisasi Rp. 1.056.132.541,00 capaian sebesar 74,08%. Indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 67% dan realisasi 75,91 capaian sebesar 113,30%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.2.689.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.329.250,00 (86,62%). Indikator kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan target 70,00% terealisasi sebesar 75,91% capaian 108,44%%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 951.504.110,00 terealisasi sebesar Rp. 625.938.044,00 sebesar 65,78% dengan indikator kegiatan Jumlah laporan administrasi keuangan tersusun tepat waktu target sebesar 5 laporan dan terealisasi 7 laporan capaian 140,00%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 791.400,00 terrealisasi sebesar Rp.675.000,00 sebesar 85,37% dengan indikator kegiatan Tingkat Disiplin Aparatur target sebesar 100% dan terealisasi 98,25% capaian 98,25%.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.403.384.700,00 terrealisasi sebesar Rp. 391.855.000,00 sebesar 97,12% dengan indikator kegiatan Pelayanan administrasi umum terselenggara dengan lancar target sebesar 100% dan terealisasi 100,00% capaian 100,00%.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 39.952.850,00 terrealisasi sebesar Rp. 10.237.147,00 sebesar 25,62% dengan indikator kegiatan Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 100% dan terealisasi 100% capaian 100%
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 27.326.598,00 terrealisasi sebesar Rp. 25.097.500,00 sebesar 91,84% dengan indikator kegiatan Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik sebesar 100% dan terrealisasi 50,00% capaian 50,00%

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.086.828.350,00 dan terealisasi Rp. 1.032.595.950,00 capaian sebesar 95,01. Indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dengan target sebesar 100% dan realisasi 95,01 %.

Adapun kegiatan yang mendukung Program Penelitian dan pengembangan

Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 71.256.800,00 terealisasi sebesar Rp. 65.246.040,00 sebesar 91,56% dengan indikator kegiatan Persentase rencana kelitbangan yang terlaksana target sebesar 76,66% dan terealisasi 76,66% capaian 100,00%.
- b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 172.472.300,00 terealisasi sebesar Rp.170.381.050,00 sebesar 98,79% dengan indikator kegiatan Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti target sebesar 85% dan terealisasi 78,95% capaian 92,88%
- c) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.127.009.000,00 terrealisasi sebesar Rp.125.450.600,00 sebesar 98,77% dengan indikator kegiatan Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti target sebesar 85% dan terrealisasi 84,62% capaian 99,55%.
- d) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp.716.090.250,00 terrealisasi sebesar Rp.671.518.260,00 sebesar 93,78% dengan indikator kegiatan Tingkat kematangan inovasi daerah target sebesar 50% dan terrealisasi 60,58% capaian 121,16%.

2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut pelaksanaannya belum/tidak sesuai perencanaan yang telah ditentukan.

Adapun faktor penghambat pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
- Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana, kekurangan jumlah

dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.

- Kurangnya Koordinasi dalam pengisian kelembagaan karena OPD Brista adalah baru terbentuk dan ditetapkan pada akhir tahun 2022, juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

2.1.3 Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga akhir tahun 2023 tidak didukung oleh tersedianya Gedung Kantor yang memadai untuk ditempati dan mengakibatkan pelaksanaan dalam mendukung kegiatan rutin atau program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ada keterlambatan yang seharusnya dimulai pada awal tahun akhirnya baru bisa dilaksanakan pada bulan Nopember 2023.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yaitu

- Belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan dalam hal identifikasi hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis. Selain itu, dalam hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah ditemukan kendala banyaknya inovasi yang belum dikembangkan melalui dukungan penyediaan kebijakan, penyusunan SOP pendukung, penyediaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi, serta kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi yang belum melibatkan stakeholder eksternal terkait.
- Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan pengumpulan data kelitbangan dari perangkat daerah serta melakukan asistensi dalam pengelolaan

inovasi oleh perangkat daerah. Selain itu juga telah dilakukan upaya diseminasi inovasi dengan menghadirkan narasumber dari Badan Strategi kebijakan Dalam Negeri

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program / kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2023.
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
3. Efisiensi alokasi belanja.
4. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (Tahun berjalan) di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat kita lihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Klungkung

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
			K	Rp	K	Rp	Target Renja PD tahun (2023)		Realisasi Renja PD tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			3.262.186.838		659.189.644		2.883.215.108		2.088.728.691		72,44		3.539.247.660		713.286.166		21,87
5.05.	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan			3.262.186.838		659.189.644		2.883.215.108		2.088.728.691		72,44		3.539.247.660		713.286.166		21,87
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	67 poin	1.947.319.738			67	1.425.648.658		1.056.132.841	113,30	74,08	67	2.129.894.260		712.711.166		36,60
5.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	70 persen	97.679.400			70	2.689.000		2.329.250	108,44	86,62	70	87.884.150		70.251.878		71,92
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 dokumen	95.503.400			8	2.316.900		1.982.200		85,55		85.940.500		70.251.879		73,56
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29 Laporan	2.176.000			29	372.100		347.050		93,27		1.943.650		0		0,00

5.05.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu</i>	5 lap	1.566.529.782			5	951.504.110	7	625.938.044	140,00	65,78	25	1.473.051.419	625.707.101	39,94
5.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	9 orang/bulan	1.562.322.132			9	949.707.760		624.389.894		65,75		1.468.686.419	625.207.101	40,02
5.05.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	13 laporan	4.207.650			12	1.796.350		1.548.150		86,18		4.365.000	500.000	11,88
5.05.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tingkat Disiplin Aparatur</i>	100 persen	3.483.100			100	791.400	98,25	675.900	98,25	85,41	100	2.657.000	300.000	8,61
5.05.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 dokumen	3.483.100			2	791.400		675.900		85,41		2.657.000	300.000	8,61
5.05.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum</i>	100 persen	46.359.100			100	403.384.700	100	391.855.000	100,00	97,14	100	360.452.455	270.000	0,58
5.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	37.400.000			1	401.751.000		390.480.000		97,19		353.829.675	0	0,00
5.05.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 dokumen	8.959.100			1	1.633.700		1.375.000		84,16		6.622.780	270.000	3,01
5.05.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 persen	146.067.800			100	39.952.850	100	10.237.147	100,00	25,62	100	131.817.780	14.777.187	10,12
5.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber</i>	1 laporan	57.134.000			1	18.533.500		3.210.597		17,32		57.170.000	12.505.187	21,89

		<i>Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>															
5.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 laporan	88.933.800			2	21.419.350		7.026.550		32,80		74.647.780		2.272.000	2,55
5.05.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	100 persen	87.200.556			100	27.326.598	50	25.097.500	50,00	91,84	100	74.031.456		1.405.000	1,61
5.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	4 unit	87.200.556			4	27.326.598		25.097.500		91,84		74.031.456		1.405.000	1,61
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan</i>	66,66 poin	1.314.867.100	100	659.189.644	100	1.457.566.450	84,38	1.032.595.850	84,38	70,84	33,33	1.409.353.400		575.000	0,04
5.05.02.2.0 1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana</i>	76,66 persen	151.499.700	63,33	80.971.650	76,66	71.256.800	86,67	65.246.040	113,06	91,56	76,66	368.501.200		0	0,00
5.05.02.2.0 1.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>					1	71.256.800		65.246.040		91,56		106.208.500		0	
5.05.02.2.0 1.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	2 laporan	151.499.700		80.139.650	2							262.292.700		0	0,00

5.05.02.2.0 1.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			1	832.000												
5.05.02.2.0 2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti	66.66 persen	216.122.300	85	151.118.009	85	172.472.300	84,21	170.381.050	99,07	98,79	85	114.264.280	100.000			0,05
5.05.02.2.0 2.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial	1 dokumen	108.120.000			1	51.095.000		50.401.450		98,64						0,00
5.05.02.2.0 2.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	108.002.300														0,00
5.05.02.2.0 2,0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			1 dok	151.118.009	1	121.377.300		119.979.600		98,85		114.262.280	100.000			
5.05.02.2.0 3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	66.66 persen	118.109.000	85	51.983.020	85	127.009.000	84,62	125.450.500	99,55	98,77	85	104.748.240	100.000			0,08
5.05.02.2.0 3.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1 dok	51.983.020												
5.05.02.2.0 3.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen				1 dok	52.009.000		51.450.500		98,93		104.748.240	100.000			

5.05.02.2.0 3.0005	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		118.109.000														0,00
5.05.02.2.0 3.0006	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</i>	1 dokumen				1	75.000.000		74.000.000		98,67						
5.05.02.2.0 4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Tingkat Kematangan Inovasi Daerah</i>	50 persen	829.136.100	50	375.116.965	50	716.090.250	60,58	671.518.260	121,16	93,78	50	821.839.680	375.000			0,05
5.05.02.2.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	1 laporan	129.355.800		1.436.900	1	164.803.800		161.655.000		98,09		115.811.480				0,00
5.05.02.2.0 4.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	<i>umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	1 laporan	694.116.700		373.680.065	1	547.374.650		507.330.260		92,68		701.934.240	375.000			0,05
5.05.02.2.0 4.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	1 laporan	5.663.600			1	3.911.800		2.533.000		64,75		4.093.960				0,00

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2023 hampir seluruhnya tercapai dengan kategori sangat tinggi, walaupun masih ada 1 kegiatan yang kategori kurang. Adapun kenapa kategori kurang adalah karena dari Januari hingga Oktober Brida masih berkantor di Bappeda sehingga tidak ada realisasi keuangan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Demikian pula jika dengan perkiraan capaian kinerja Renstra 2024-2026 pada tahun 2024 seluruh program dan kegiatan akan dapat tercapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang meskipun capaiannya sudah sangat tinggi namun jika dilihat dari target yang ditetapkan, belum optimal sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya dan juga masih terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik.

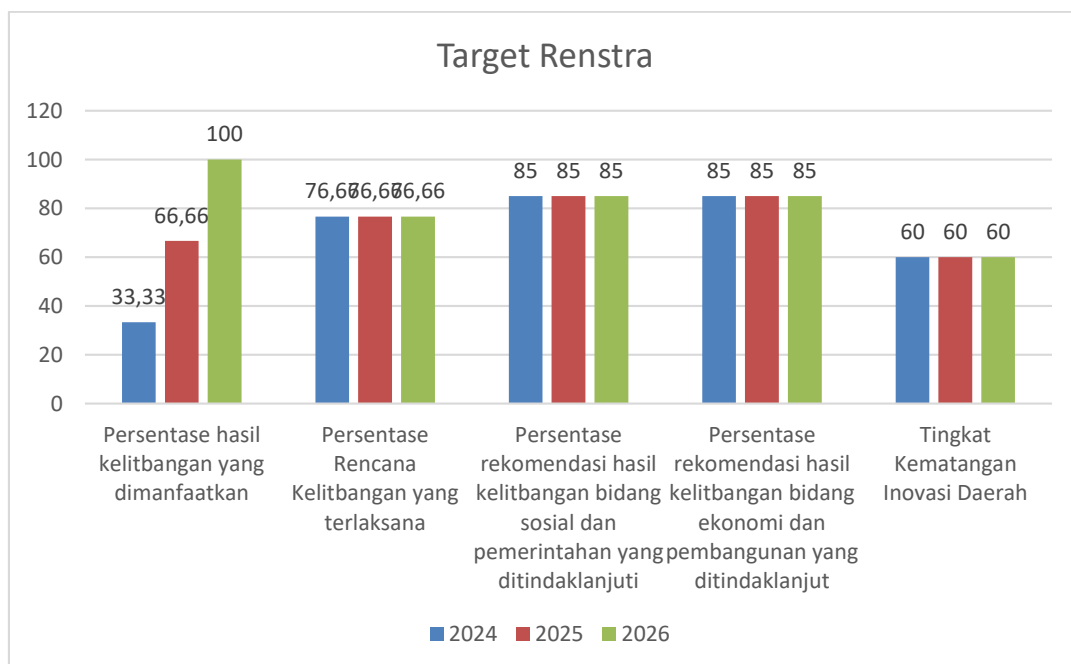
Dalam pelaksanaan Renja Brida Tahun 2023 ditemui beberapa kendala antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terbatasnya sumber daya yang menjadi kendala utama dimana kondisi saat ini Brida hanya berjumlah 9 orang (Kepala, Sekretaris, Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, 1 orang Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi, 1 orang Bendahara, 3 orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 orang Analis Kebijakan Ahli Pertama. Jumlah dan kualifikasi pegawai Brida belum memenuhi kebutuhan minimal Perangkat daerah yang berbentuk Badan. Dimana perangkat daerah berbentuk badan secara ideal memerlukan pegawai minimal 40 orang. Brida juga belum mempunyai aparatur perencanaan. Dari segi sarana prasana, Brida masih meminjam kantor di ex Dinas Penanaman Modal dan Perjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.
2. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan dalam hal identifikasi hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis. Selain itu, dalam hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah ditemukan kendala banyaknya inovasi yang belum dikembangkan melalui dukungan penyediaan kebijakan, penyusunan SOP pendukung, penyediaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi, serta kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi yang belum melibatkan stakeholder eksternal terkait.
3. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah belum diterapkan secara optimal

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Brida memiliki tugas pokok tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Target renstra Brida bisa dilihat pada gambar dibawah



Pada tahun 2023 realisasi Indeks Inovasi Daerah adalah 60.77 poin dengan capaian 101.3 persen.

Faktor yang menghambat kinerja kelitbangan adalah masalah sumber daya manusia yang kompeten dalam kelitbangan masih terbatas dan belum tersedianya sistem informasi kelitbangan yang meliputi tersedianya data hasil kajian dan inovasi yang memadai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					2024	2025	2026		2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Inovasi Daerah				60 poin	62 poin	64 poin		62 poin	64 poin	
2	Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan renbangda				33,33 persen	66,66 persen	100 persen		66,66 persen	100 persen	
3	Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana				76,66 persen	76,66 persen	76,66 persen		76,66 persen	76,66 persen	
4	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti				85 persen	85 persen	85 persen		85 persen	85 persen	
5	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti				85 persen	85 persen	85 persen		85 persen	85 persen	
6	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah				50 persen	50 persen	50 persen		50 persen	50 persen	

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa belum ada realisasi capaian karena masih proses pelaksanaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung :

- 1 Hasil Kajian Yang Dilaksanakan Menjadi Kebutuhan Dalam Penyusunan Perencanaan Bagi OPD
- 2 Optimalisasi Penerapan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3 Optimalisasi Penerapan Dan Perlindungan HAKI Atas Teknologi Sederhana Dan Teknologi Tepat Guna

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung pada Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung meliputi:

1. Kepala Badan 1 orang.
2. Sekretaris Badan 1 orang.
3. Kasubbag di Sekretariat 1 orang.
4. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan 4 orang
5. Bendahara 1 orang
6. Fungsional Umum 1 orang.

Jumlah sumber daya manusia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebanyak 9 orang. perlunya penambahan SDM untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung antara lain:

1. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah belum diterapkan secara optimal
2. Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
3. Teknologi sederhana dan teknologi tepat guna belum diterapkan

dan dilindungi HAKI-nya secara optima

4. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Meningkatkan pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung melibatkan serangkaian tantangan dan peluang yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang bisa dihadapi :

Tantangan :

1. Sumber Daya Manusia yang belum optimal terkait dengan keterampilan teknis dan manajerial yang memadai. Kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan metodologi riset.
2. Keterbatasan anggaran untuk riset, kajian dan pengembangan menghambat inovasi.
3. Keterbatasan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan ketinggalan teknologi atau infrastruktur IT yang tidak memadai.
4. Membangun Kerjasama yang efektif dengan lembaga penelitian lainnya, universitas dan lembaga lianya
5. Kebutuhan untuk penyesuaian kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi.
6. Kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya riset dan inovasi . tantangan dalam melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam riset.

Peluang :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas.
2. Mencari sumber dana alternatif termasuk hibah riset, kerjasama dengan industri, dan investasi swasta.
3. Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi riset dan pengelolaan data. Membangun platform digital untuk berbagai informasi dan kolaborasi riset.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga riset nasional untuk memperluas jaringan dan sumber daya.

2.3.4 Mendorong pembaruan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang ini Brieda dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah melalui riset dan inovasi yang berkualitas.

2.3.5 Formulasi Isu-isu penting

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak terhadap visi-misi Kepala Daerah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan penelitian dan pengembangan sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan : Isu: Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Formulasi: Penelitian tentang teknik pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan potensi laut yang berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan Isu: Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Formulasi: Riset tentang kebutuhan keterampilan pasar kerja, pengembangan kurikulum berbasis

kebutuhan industri lokal, serta inovasi dalam metode pengajaran dan pelatihan.

- 3) Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Informasi Isu: Infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Formulasi: Penelitian dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur digital, akses internet yang lebih luas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik.
- 4) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal Isu: Keterbatasan daya saing produk lokal di pasar global maupun nasional. Formulasi: Riset tentang potensi pasar, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk lokal dari Klungkung
- 5) Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat Isu: Masalah ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan pola makan dan penyakit lokal. Formulasi: Penelitian tentang sistem pertanian yang mendukung ketahanan pangan, serta inovasi dalam penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis data lokal.
- 6) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM Isu: Potensi ekonomi kreatif dan UMKM yang belum dimanfaatkan secara optimal. Formulasi: Penelitian tentang peluang pasar untuk ekonomi kreatif, inovasi dalam model bisnis UMKM, serta dukungan kebijakan untuk pengembangan sektor ini.
- 7) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Isu: Masalah lingkungan seperti pencemaran dan pengelolaan sampah yang belum efektif. Formulasi: Riset tentang teknologi pengolahan sampah, sistem pengelolaan limbah, serta inovasi dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- 8) Pengembangan Budaya dan Pariwisata Lokal Isu: Potensi budaya dan pariwisata lokal yang belum sepenuhnya dikembangkan. Formulasi: Penelitian tentang pelestarian budaya lokal, pengembangan atraksi pariwisata yang menarik, serta strategi promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif.
- 9) Inovasi dalam Layanan Publik Isu: Efisiensi dan efektivitas layanan publik yang belum optimal. Formulasi: Riset tentang inovasi dalam pelayanan publik, teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, serta sistem

manajemen yang lebih transparan dan responsif.

Untuk menghadapi isu-isu tersebut, badan riset dan inovasi daerah Kabupaten Klungkung perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan yang berbasis data dan partisipatif akan sangat membantu dalam merumuskan solusi yang relevan dan berdampak positif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2025.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 sebagai Tabel 2.3.sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Klungkung

Badan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				3,701,397,755	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				4,117,145,455	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3,701,397,755	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4,117,145,455	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 poin	2,022,448,215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	67 poin	2,411,695,915	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 poin	102,065,160	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	70 persen	120,765,060	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 dokumen	99,639,380	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 dokumen	118,339,280	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29 Laporan	2,425,780	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29 Laporan	2,425,780	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	5 laporan	1,572,850,019	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu</i>	5 laporan	1,922,819,819	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	9 orang/bulan	1,568,392,619	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	9 orang/bulan	1,914,762,419	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	13 laporan	4,457,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	13 laporan	8,057,400	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Tingkat Disiplin Aparatur	100 persen	3,732,900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Tingkat Disiplin Aparatur</i>	100 persen	3,732,900	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 dokumen	3,732,900	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 dokumen	3,732,900	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen	67,778,980	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum</i>	100 persen	92,778,980	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	60,790,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	85,790,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 dokumen	6,988,980	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 dokumen	6,988,980	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	158,320,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 persen	148,020,600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	68,664,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	63,664,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 laporan	89,656,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 laporan	84,356,600	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen	117,700,556	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	100 persen	123,578,556	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 unit	87,700,556	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 unit	93,578,556	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 unit	30,000,000	
B	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Klungkung	Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda	33,33 persen	1,678,949,540	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda</i>	66.66 persen	1,705,449,540	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Klungkung	Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana	76,66 persen	865,987,420	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana</i>	76.66 persen	850,587,420	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan</i>	1 laporan	731,867,580	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan</i>	1 laporan	741,467,580	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			<i>Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>					<i>Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>			
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan</i>	1 rekomendasi	134,119,840	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan</i>	1 rekomendasi	109,119,840	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kabupaten Klungkung	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti	33,33 persen	183,120,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti</i>	85 persen	183,120,000	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	2 dokumen	183,120,000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	2 dokumen	183,120,000	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Klungkung	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	33,33 persen	181,324,900	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti</i>	85 persen	156,324,900	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	1 dokumen	78,768,900	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	1 dokumen	78,768,900	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidu</i>	1 dokumen	102,556,000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidu</i>	1 dokumen	77,556,000	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Klungkung	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	60 persen	448,517,220	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Klungkung	<i>Tingkat Kematangan Inovasi Daerah</i>	50 persen	515,417,220	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	1 laporan	116,950,780	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	1 laporan	116,950,780	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Klungkung	<i>umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	1 laporan	326,136,640	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Klungkung	<i>umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	1 laporan	327,170,640	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	1 laporan	5,429,800	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	1 laporan	39,895,800	
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	Kabupaten Klungkung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	1 laporan	31,400,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja tahun 2025, Brida telah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah secara virtual yang bertujuan untuk menggali usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal Renja. Dalam pelaksanaan forum tersebut tidak ada usulan yang signifikan.

Tabel 2.4.

Usulan dan permasalahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Klungkung

No.	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan Kab/Kota pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional digunakan sebagai bahan dalam menyusun isu strategis RPD yang ditindaklanjuti untuk penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026. Pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP 2025 diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu : 1) SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2) infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; 3) ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia

Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
4. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
6. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang mempunyai urusan bidang kelitbangan dan inovasi mendukung prioritas ke 6 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

3.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan

penyelarasan tujuan, sasaran, indikator dan target pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, indikator serta target provinsi Bali dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Bali.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 terdiri dari:

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Brida Klungkung mendukung prioritas Pembangunan yang ke 2 yaitu Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan.

3.3 Telaah kebijakan pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2025 terdiri dari:

1. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung ke-4 yaitu Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

3.4 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dibidang penelitian dan pengembangan, mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu terfasilitasinya penerapan inovasi teknologi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2025
Terfasilitasinya Penerapan Inovasi Teknologi		Jumlah Inovasi teknologi yang diterapkan	1 inovasi
	Meningkatnya penyelenggaraan Inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	62 poin

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah BRIDA Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
1	Terfasilitasinya Penerapan Inovasi Teknologi		Jumlah Inovasi teknologi yang diterapkan	1 inovasi
		Meningkatnya penyelenggaraan Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	62 poin

Indikator Kinerja Utama Sasaran jangka menengah Brida Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya penyelenggaraan Inovasi daerah merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Brida. Oleh karena itu, indikator kinerja sasaran tersebut ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Brida dengan target kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya penyelenggaraan Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	62 poin

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi Bida Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Terfasilitasinya Penerapan Inovasi Teknologi	Meningkatnya penyelenggaraan Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas hasil kelitbang

Dalam rencana strategis ini dijabarkan indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Klungkung secara umum adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Bida Tahun 2024-2026

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Tujuan Tahun			Kondisi Akhir periode
			2024	2025	2026	
1	Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan publik	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	3 Inovasi
	Meningkatkatnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	54,59 poin	60 poin	62 poin	64 poin	64 poin

3.5.2 Arah Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.4 di atas, maka dirumuskan arah kebijakan selama lima tahun pelaksanaan Renstra ini sebagai berikut :

Tabel 3.6

Strategi dan Arah Kebijakan Brista Tahun 2024-2026

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan	Penyusunan Perencanaan Kelitbangan
		Penyediaan, diseminasi dan monev hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
		Penyediaan, diseminasi dan monev hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan inovasi dan teknologi
		Evaluasi kebijakan

Pada dasarnya program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 merencanakan 2 Program, 10 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang termasuk dalam Belanja Langsung. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 1 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Total Kebutuhan Dana Untuk Tahun 2025 yang telah di Input pada Aplikasi SIPD Kemendagri adalah Rp. 4.117.145.455,-

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Klungkung

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				4.117.145.455,00				3.432.272.485,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.117.145.455,00				3.432.272.485,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4.117.145.455,00				3.432.272.485,00
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	Kabupaten Klungkung	67 poin	2.411.695.915,00			67 poin	1.927.830.285,00
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Kabupaten Klungkung	70 persen	120.765.060,00			70 persen	107.132.460,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kabupaten Klungkung	8 Dokumen	118.339.280,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	104.706.460,00
5.05.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kabupaten Klungkung	29 Laporan	2.425.780,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29 Laporan	2.426.000,00
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu</i>	Kabupaten Klungkung	5 laporan	1.922.819.819,00			5 laporan	1.473.144.069,00
5.05.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kabupaten Klungkung	9 Orang/bulan	1.914.762.419,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Orang/bulan	1.468.686.419,00
5.05.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	Kabupaten Klungkung	13 Laporan	8.057.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	4.457.650,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tingkat Disiplin Aparatur</i>		100 persen	3.732.900,00			100 persen	3.733.100,00
5.05.01.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Kabupaten Klungkung	2 Dokumen	3.732.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	3.733.100,00
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum</i>		100 persen	92.778.980,00			100 persen	67.779.100,00
5.05.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kabupaten Klungkung	1 Paket	85.790.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	60.790.000,00
5.05.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	6.988.980,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.989.100,00
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		100 persen	148.020.600,00			100 persen	158.341.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	63.664.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	68.664.000,00
5.05.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kabupaten Klungkung	2 Laporan	84.356.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	89.677.000,00
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>		100 persen	123.578.556,00			100 persen	117.700.556,00
5.05.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kabupaten Klungkung	4 Unit	93.578.556,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	87.700.556,00
5.05.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kabupaten Klungkung	1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase hasil ketersediaan untuk kelitbangan penyusunan Rembangda</i>		66.66 persen	1.705.449.540,00			100 persen	1.504.442.200,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana</i>		76.66 persen	850.587.420,00			76.66 persen	292.987.700,00
5.05.02.2.01. 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	741.467.580,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Laporan	158.867.800,00
5.05.02.2.01. 0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan</i>	Kabupaten Klungkung	1 Rekomen dasi	109.119.840,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Rekomendasi	134.119.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase hasil rekomendasi kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti</i>		85 persen	183.120.000,00			85 persen	183.120.000,00
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	Kabupaten Klungkung	2 Dokumen	183.120.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Dokumen	183.120.000,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase hasil rekomendasi kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti</i>		85 persen	156.324.900,00			85 persen	78.769.000,00
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	78.768.900,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Dokumen	78.769.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.02.2.03. 0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	77.556.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		0,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Tingkat Kematangan Inovasi Daerah</i>		50 persen	515.417.220,00		50 persen	949.565.500,00	
5.05.02.2.04. 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	116.950.780,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	1 Laporan	116.950.800,00	
5.05.02.2.04. 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	327.170.640,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	1 Laporan	817.184.700,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.05.02.2.04. 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	39.895.800,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Laporan	5.430.000,00
5.05.02.2.04. 0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	31.400.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Laporan	10.000.000,00
JUMLAH					4.117.145.455,00				3.432.272.485,00

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rancangan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Brista melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- Penyusunan RKA Brista Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi DPA SKPD berpedoman pada Renja Brista tahun 2025.

Perubahan Renja dapat dilakukan berpedoman pada perubahan RKPD dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan.

Pj. BUPATI KLUNGKUNG

NYOMAN JENDRIKA